

MONITORING DAN EVALUASI TERPADU BANTUAN MASYARAKAT YANG BERSUMBER DARI APBN, APBD PROVINSI, DAN APBD KAB/KOTA TAHUN ANGGARAN 2021 DAN 2022



Kegiatan monitoring dan evaluasi terpadu tersebut dilaksanakan dalam rangka pengendalian risiko Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023. Monitoring dan evaluasi terpadu ini merupakan bantuan masyarakat yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kab/Kota Tahun Anggaran 2021 dan 2022. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 12 - 13 Oktober 2023 di Ruang Rapat Lt. II Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII Provinsi Jawa Tengah, Jl. Slamet Riyadi No. 1 Kota Surakarta. Kegiatan dihadiri oleh perwakilan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah (35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah), BPKP Jawa Tengah, Bappeda Provinsi Jawa Tengah, Biro Administrasi Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah serta perwakilan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.

Kegiatan monitoring dan evaluasi terpadu Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah dibuka oleh Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Narasumber yang berasal dari BPKP Jawa Tengah, Bappeda Provinsi Jawa Tengah, dan Biro Administrasi Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan materi yang telah disampaikan didapatkan pentingnya pengendalian risiko dalam setiap perencanaan pada setiap OPD sehingga dalam setiap kegiatan terdapat indikator dalam mengawasi kegiatan yang telah dilaksanakan tersebut. Hal ini perlu diperhatikan dan setiap OPD harus memiliki RTP (Rencana Tindak Pengendalian).



Monitoring bantuan masyarakat yang bersumber dari APBN berdasarkan DAK yang pernah disalurkan/dihibahkan ke Kabupaten Tegal. Desk dilakukan untuk mengetahui tingkat pemanfaatan bantuan yang telah diberikan serta permasalahan yang terjadi dari pemberian bantuan tersebut. Selain itu, upaya-upaya penyelesaian masalah yang terjadi perlu disampaikan dalam mengatasi masalah yang tersebut. Setelah desk bantuan masyarakat yang berasal dari APBN, dilanjutkan dengan desk dengan dana yang berasal dari APBD Provinsi Jawa Tengah. Desk ini diikuti oleh Bidang Pengawasan, Budidaya, Perikanan Tangkap, dan Bagian Program Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah serta Dinas Perikanan Kab/Kota yang mendapatkan bantuan. Desk bantuan masyarakat yang berasal dari APBD Provinsi Jawa Tengah kepada Dinas Perikanan Kabupaten Tegal telah sesuai dengan data yang telah dimiliki oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah. Serta bantuan tersebut telah dimanfaatkan dan tidak terdapat masalah dalam pengelolaannya. Sehingga desk berjalan dengan baik dan lancar tanpa kendala

*Bidang Perikanan Tangkap
Dinas Perikanan Kabupaten Tegal
@2023*

